



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 615-624

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung *Code of Conduct* Penyelesaian Konflik di Wilayah Laut China Selatan

Widiyanto^{1✉}, Syaiful Anwar², Agung Risdhianto³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: widi93@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan Laut China Selatan menjadi salah satu urgensi yang perlu segera di selesaikan bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara, hal ini di dasarkan pada potensi meluasnya konflik yang akan mengakibatkan lebih banyak negara adidaya yang terlibat pada permasalahan ini, hal ini dapat dilihat dari munculnya Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang telah hadir untuk mendukung negara-negara sekutu di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penerapan kontak bilateral dan multilateral antara pejabat senior pertahanan dalam mendorong resolusi damai serta Pelaksanaan operasi gabungan dan latihan militer bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk meningkatkan stabilitas regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang didukung dengan wawancara, studi pustaka dan observasi sebagai metode dalam penelusuran data dan fakta, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Salah satu bentuk dari Penerapan kontak bilateral dan multilateral antara pejabat senior pertahanan untuk mendorong resolusi damai, di laksanakan melalui ASEAN Defence Minister's Meeting Plus (ADMM Plus), ADMM-Plus menyediakan kerangka kerja kelembagaan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk dapat memperluas cakupan program kerja yang dilaksanakan dalam kerjasama militer. Kegiatan militer dan kerjasama ini mencakup berbagai informasi yang secara intens diinformasikan pada setiap anggotanya dan Pelaksanaan operasi gabungan bilateral dan multilateral serta latihan militer dengan negara lain untuk meningkatkan stabilitas regional, dalam beberapa bentuk di laksanakan dengan latihan bersama antar negara di sebuah kawasan, Latihan bersama antar negara seringkali dilaksanakan dalam sebuah payung hukum kerjasama yang disebut sebagai Defence Cooperation Agreement (DCA).

Kata Kunci: *Konflik Laut China Selatan, Diplomasi Pertahanan, Code of Conduct Laut China Selatan, Laut China Selatan*

Abstract

The South China Sea problem is one of the urgency that needs to be resolved immediately for countries in the Southeast Asian region, this is based on the potential for widespread conflict which will result in more superpowers being involved in this problem, this can be seen from the existed of the United States as one of the actors that have been present to support allied countries in Southeast Asia. This study aims to analyze how the application of bilateral and multilateral contacts between senior defense officials in encouraging peaceful resolutions as well as the implementation of joint operations and bilateral and multilateral military exercises with other countries to enhance regional stability. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods supported by interviews, literature studies and observations as methods in tracing data and facts, where based on the results of the study it is known that one form of the application of bilateral and multilateral contacts between senior defense officials to encourage peaceful resolution, is carried out through the ASEAN Defence Minister's Meeting Plus (ADMM Plus), ADMM-Plus provides an institutional framework for ASEAN member states to be able to expand the scope of work programs implemented in military cooperation. These military activities and cooperation include information that is intensely informed to each member and the conduct of joint bilateral and multilateral operations and military exercises with other countries to enhance regional stability, in some form carried out by joint exercises between countries in a region, Joint exercises between countries are often carried out under a legal umbrella of cooperation called the Defence Cooperation Agreement (DCA).

Keywords: *South China Sea Conflict, Defense Diplomacy, South China Sea Code of Conduct, South China Sea*

PENDAHULUAN

Selama satu dekade terakhir, perkembangan politik dunia telah mengalami banyak perubahan yang sangat dinamis di berbagai daerah. Di kawasan Asia-Pasifik, klaim teritorial di Laut Cina Selatan semakin mengkhawatirkan Amerika Serikat, yang secara bertahap melemahkan pengaruhnya di Timur Tengah yang telah menjadi perhatiannya selama beberapa dekade. Fakta ini membuktikan bahwa kebijakan Amerika Serikat untuk lebih memperhatikan kawasan Asia-Pasifik (pivot to Asia) ditujukan untuk menjaga kepentingannya di kawasan dalam bentuk geopolitik dan geostrategi (Pedrason, 2021).

Amerika Serikat menilai sengketa teritorial antar negara di kawasan Laut China Selatan merupakan potensi ancaman yang dapat mengganggu jalur perdagangan, ekonomi, dan bisnis yang saat ini menjadi sumber devisa bagi Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat ini telah mendesak China untuk bersiap mengamankan wilayahnya dengan membangun dan mengembangkan kekuatan militernya di Laut China Selatan, dalam hal ini Mahroza (2022) mengatakan bahwa langkah ini merupakan respons kekuatan besar.

Langkah itu kemudian disebut sebagai kebangkitan China untuk mewujudkan ambisinya sebagai kekuatan terbesar kedua di dunia dalam bidang ekonomi dan militer setelah Amerika Serikat (Seskoed, 2019). Perluasan hegemoni Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan diwujudkan dengan reklamasi dan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan. Langkah China ini telah menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitar kawasan ini.

Di sektor pertahanan, Amerika Serikat melakukan strategi Freedom of Navigation Operations (FONOPs) yang diterapkan hingga 23 kali pada tahun 2019, dengan tujuan strategis memindahkan 60 persen armada angkatan laut Amerika Serikat ke kawasan Indo-Pasifik paling lambat tahun 2020 (Iswara, 2020). Strategi ini merupakan langkah besar untuk memastikan kehadiran A.S. di kawasan ini dengan melakukan operasi penjaga dalam jarak 12 mil dari pulau-pulau yang disengketakan untuk menyeimbangkan hegemoni militer Tiongkok di Laut Cina Selatan (Perwita, 2017).

Dalam perkembangannya, sejak 2010 konflik LCS juga mulai "menyeret" Indonesia setelah China menguasai wilayah utara Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, menurut Perwita (2017) klaim China atas perairan wilayah Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum dan hanya didasarkan pada argumen zona penangkapan ikan tradisional. Klaim sepihak China atas perairan Natuna terus membawa Indonesia dan China ke situasi "panas" pada 2013 dan mencapai puncaknya pada 2016.

Pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2016, sejumlah kapal penangkap ikan Tiongkok berlayar ke ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Insiden itu terjadi lagi pada 2019 dan 2020, kali ini tidak hanya kapal penangkap ikan yang terlibat, tetapi penjaga pantai Tiongkok juga melakukan pelanggaran serupa.

Dalam perspektif Indonesia, baik diplomasi secara umum maupun diplomasi pertahanan pada khususnya merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas wilayah Indonesia, dimana secara umum diplomasi pertahanan tidak hanya sebagai alat tawar-menawar tetapi juga dapat digunakan untuk menengahi potensi konflik. Di kancah internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga sudah biasa ketika perbedaan tersebut menimbulkan friksi dan menjadi pemicu konflik antar negara. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, maka negara menggunakan jalur diplomasi dalam mengamankan dan mencapai kepentingan nasionalnya (Jemadu, 2008)

Berdasarkan pada latar belakang fakta fenomena yang merupakan sebuah sintesa teoritis dari teori yang disampaikan oleh Cottey dan Fortser (2004), maka dapat di asumsikan bahwa berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia pada dasarnya berusaha berada pada posisi netral dan jika memungkinkan menjadi mediator potensial. Namun, dengan kepentingan nasional Indonesia (klaim China di perairan Natuna) dan kenyataan tentang geopolitik saat ini, hampir tidak mungkin bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi itu.

Selain itu, jika di elaborasikan dengan berbagai konflik yang terjadi di lapangan, meski Indonesia bukan bagian pihak yang mengklaim Laut Cina Selatan, namun potensi Indonesia secara diplomatis bisa kuat dalam posisi sebagai mediator. Posisi ini dapat digunakan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia agar dapat mengatasi tindakan negara lain, terutama China yang mulai tegas dan siap dalam menyikapi berbagai kemungkinan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai "claimant state", namun dalam hal ini pelaksanaan diplomasi yang dilakukan Indonesia tampaknya tidak berjalan maksimal. Beberapa diplomasi pertahanan Indonesia yang bertujuan mengurangi penyebaran konflik di kawasan LCS.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (Moleong, 2012).

Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2015).

Dari latar belakang penelitian penulis berasumsi bahwa penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode dalam pelaksanaan penelitian hal ini dikarenakan Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan

dalam penelitian kualitatif (Miles, 1992) andasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk dari Penerapan kontak bilateral dan multilateral antara pejabat senior pertahanan untuk mendorong resolusi damai, di laksanakan melalui ASEAN Defence Minister's Meeting Plus (ADMM Plus). ADMM-Plus dibentuk sebagai upaya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan pada tiga level. Pertama, mempromosikan kerjasama praktis di tingkat operasional antara militer ASEAN melalui rencana kerja dua tahun yang disusun oleh kepala angkatan bersenjata negara-negara ASEAN. Kedua, keterlibatan ASEAN dengan negara non-ASEAN dalam isu non tradisional serta lintas batas. Terakhir yaitu dapat memperkuat sentralitas dalam perencanaan keamanan di Asia Tenggara.

Pada umumnya, ADMM- Plus memiliki tujuan untuk mengupayakan terciptanya komitmen dalam menjalankan kerjasama dibidang diplomasi pertahanan diantara sesama negara anggotanya Forum ADMM-Plus yang merupakan forum pertahanan yang bersifat konsultatif mendorong para anggota berfokus pada beberapa tantangan dari terbentuknya ADMM-Plus. Kerjasama yang terjalin diharapkan dapat menumbuhkan tercapainya tujuan yang disepakati pada pertemuan yang dilaksanakan para anggotanya.

ADMM-Plus menyediakan kerangka kerja kelembagaan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk dapat memperluas cakupan program kerja yang dilaksanakannya dalam kerjasama militer. Kegiatan militer dan kerjasama ini melibatkan berbagai informasi yang secara intens diinformasikan pada setiap anggotanya. Semakin berkembangnya peran ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM Plus) sebagai Forum Diplomasi Pertahanan di kawasan Asia Forum ADMM memiliki anggota tetap yaitu semua negara anggota ASEAN, yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philipines, Singapore, Thailand, dan Vietnam yang termasuk ke dalam anggota ADMM tersebut.

Pertemuan ADMM keempat yang bertempat di Hanoi, Viet Nam pada bulan Mei 2010. Dalam pertemuan ini hanya menganalisis terkait rencana pembentukan ADMM-Plus, dari pertemuan ini tidak banyak membahas tentang isu pertahanan, yang dilakukan para menteri pertahanan ialah mengupayakan pembentukan ADMM-Plus untuk menjadi forum pendamping ADMM dalam forum diplomasi pertahanan. Pada ADMM ke empat ini

mengupayakan proses peresmian dari forum ADMM-Plus pada tahun yang sama. ADMM-Plus memiliki tujuan untuk menyediakan wadah bagi ASEAN dan delapan mitra dialognya untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan demi terciptanya kedamaian, stabilitas, dan pembangunan wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Keberadaan ADMM menjadi salah satu penopang bagi terbangunnya salah satu pilar ASEAN Community, dimana Salah satu dasar dalam pembentukan sebuah komunitas dalam kawasan adalah rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan keamanan, unsur utama dalam hal ini adalah rasa saling percaya bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukan ditujukan untuk mengancam negara lain dalam komunitas tersebut. Maka dalam hal ini ADMM memainkan peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar ASEAN Community dalam bidang politik dan keamanan.

ADMM dalam hal ini tidak hanya memiliki signifikansi terhadap keamanan kawasan semata dalam mempercepat kohesi kawasan dan menjaga stabilitas di dalam kawasan. ADMM menjadi sebuah instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan mereka. Demikian pula dengan Indonesia yang melihat bahwa keberadaan ADMM dapat menjadi sebuah instrumen strategis bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi pertahanan secara multilateral baik terhadap seluruh negara di Asia Tenggara maupun terhadap negara-negara di luar kawasan.

Bagi Indonesia sendiri, ADMM menjadi salah satu mekanisme yang sangat efektif dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan forum multilateral yang mempertemukan sesama negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan melalui mekanisme ADMM plus. Indonesia memanfaatkan berbagai dialog konstruktif yang digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik yang berasal dari dalam kawasan, dari dinamika keamanan global serta dinamika keamanan domestik yang ada di Indonesia.

Mengacu pada deskripsi tersebut, Sejatinya diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara adalah untuk menyampaikan kebijakan luar negeri terhadap negara lain demi mencapai kepentingan nasionalnya. Demikian pula yang kemudian menjadi landasan dari dilaksanakannya diplomasi pertahanan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah melaksanakan diplomasi pertahanan dengan beberapa negara secara bilateral dengan

strategi serta agenda yang berbeda. Dalam kesempatan ini, penulis akan memaparkan mengenai diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia secara multilateral dalam kerangka ADMM.

Pelaksanaan operasi gabungan bilateral dan multilateral serta latihan militer dengan negara lain untuk meningkatkan stabilitas regional, dalam beberapa bentuk di laksanakan dengan latihan bersama antar negara di sebuah kawasan, Latihan bersama antar negara seringkali dilaksanakan dalam sebuah payung hukum kerjasama yang disebut sebagai Defence Cooperation Agreement (DCA) dimana didalamnya terdapat joint exercise berarti suatu manuver militer gabungan angkatan bersenjata dalam satu negara, simulasi operasi masa perang dan lainnya yang melibatkan perencanaan bersama, persiapan, eksekusi, dan evaluasi.

Beberapa pelaksanaan operasi gabungan yang bersifat bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan beberapa negara dapat di klasifikasikan sebagai latihan militer dengan negara ASEAN, maupun dengan negara adidaya, salah satunya amerika serikat. Sejauh ini sudah ada beberapa pelatihan bilateral di Indonesia, tetapi peningkatan pelatihan antara kedua negara akan berdampak sebagai unjuk kekuatan untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme di Indonesia atau Asia Tenggara. Jika pelatihan tersebut menjadi efektif, maka ada kemungkinan negara anggota ASEAN lain akan bergabung untuk menunjukkan bahwa menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara adalah merupakan tujuan utama.

Garuda Shield, CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training), dan Cope West Exercises adalah contoh bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama untuk melaksanakan latihan bersama. Latihan-latihan tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan antar kedua negara dan menunjukkan kepada musuh atas gelar kekuatan militer Indonesia dengan militer Amerika Serikat sehingga diharapkan memberikan efek gentar dalam mengantisipasi rencana aksi terorisme baik di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Indonesia adalah salah satu negara yang membangun Kerjasama Intelijen Gabungan 6 negara ASEAN (Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) bernama "Our Eyes". Persekutuan tersebut mirip konsep kerjasama "Five Eyes" dimana Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada dan Inggris. Pertemuan "Our Eyes" dilaksanakan di Jakarta dan Bali pada Oktober 2017, hal ini dikarenakan Indonesia ingin menunjukkan kepada negara anggota ASEAN dan negara Amerika Serikat bahwa Indonesia

sudah siap berperan sebagai salah satu pemimpin di ASEAN untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan deteksi dini akan potensi ancaman terorisme di Asia Tenggara.

Amerika Serikat juga tidak ragu untuk memberikan dukungannya melalui International Military Education and Training (IMET), Antiterrorism Assistance Program, Counterterrorism Assistance Program, Military spare parts for non-lethal items dan Economic Support Funds. Melalui program-program tersebut TNI dan POLRI bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan taktik baru, peralatan dan persenjataan yang lebih canggih. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat mendorong Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin di Asia Tenggara untuk menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Peran baru tersebut akan menciptakan kesempatan baru dan lebih luas lagi bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan taktik dalam bidang penanggulangan terorisme.

Melalui kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat yang berkelanjutan tersebut, diharapkan dapat menemukan suatu langkah-langkah preventif dalam menanggulangi ancaman terorisme baik di negara Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Maka gagasan inovatif perlunya untuk disampaikan dan ditindaklanjuti dalam pembentukan "Task Force Counter Terrorism" yang solid dengan menggabungkan unsur-unsur dari berbagai instansi yang terkait seperti: Badan Intelijen Nasional, Intelijen Kepolisian, Intelijen Militer, dan Pasukan Khusus dari kedua negara tersebut.

Selain kerjasama bilateral, Indonesia juga melakukan berbagai kooperasi multilateral demi menghadapi berbagai ancaman maritim yang mungkin terjadi di perairannya. Sejalan dengan lingkaran konsentris dari kebijakan luar negeri Indonesia, prioritas kerjasama berfokus pada kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Namun, hal tersebut bukan berarti Indonesia tidak menginisiasi kerjasama dalam lingkup yang lebih luas lagi.

Berdasarkan uraian diatas, Kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia, terdapat pula sejumlah inisiasi lain yang meliputi agenda-agenda seperti pertukaran informasi, latihan bersama, hingga penyelenggaraan dialog. Indonesia juga menjalin kooperasi dengan IMB, yang merupakan badan yang ada di bawah ICC dengan tugas mengumpulkan data aktual mengenai kejahatan di laut yang terjadi secara berkala. Meskipun Indonesia masih dapat digolongkan sebagai negara dengan kasus kejahatan transnasional yang cukup tinggi, pada Januari 2020 lalu pemerintahan Indonesia setuju untuk tetap menjalankan kerjasama dengan IMB untuk mencegah adanya pembajakan dan perampokan lebih lanjut. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari adanya berbagai kerjasama multilateral ini

dapat terselesaikannya dan tertanganinya masalah-masalah non-tradisional yang telah disebutkan secara damai.

SIMPULAN

Pada aspek tujuan, pada dasarnya Implementasi kontak bilateral dan multilateral antara pejabat senior pertahanan untuk mendorong resolusi damai, memiliki tujuan untuk mengupayakan terciptanya komitmen dalam menjalankan kerjasama dibidang diplomasi pertahanan diantara sesama negara anggotanya. Forum ADMM-Plus yang merupakan forum pertahanan yang bersifat konsultatif mendorong para anggota berfokus pada beberapa tantangan dari terbentuknya ADMM-Plus, yaitu kondusifitas kawasan, keamanan regional, keterbukaan, dan solidaritas wilayah ASEAN dari pengaruh proxy dari negara lain yang berupaya menanamkan pengaruh di Asia Tenggara secara militer, sehingga tidak ada saling curiga antar negara dalam menanggapi sebuah isu terkait dengan pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan operasi gabungan bilateral dan multilateral serta latihan militer dengan negara lain untuk meningkatkan stabilitas regional, dalam beberapa bentuk di laksanakan dengan latihan bersama antar negara di sebuah kawasan, Latihan bersama antar negara seringkali dilaksanakan dalam sebuah payung hukum kerjasama yang disebut sebagai Defence Cooperation Agreement (DCA). Selain kerjasama bilateral, Indonesia juga melakukan berbagai kooperasi multilateral demi menghadapi berbagai ancaman prioritas kerjasama berfokus pada kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Namun, hal tersebut bukan berarti Indonesia tidak menginisiasi kerjasama dalam lingkup yang lebih luas lagi.

Beberapa kerjasama regional dan multilateral yang dilakukan Indonesia diantaranya Malacca Strait Patrol, Maphilindo, ASEAN Maritime forum, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN defense Minister meeting (ADMM), Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT) dan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK). Kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia tidak hanya terbatas dari beberapa pelaksanaan yang telah di jelaskan sebelumnya, Terdapat pula sejumlah inisiasi lain yang meliputi agenda-agenda seperti pertukaran informasi, latihan bersama, hingga penyelenggaraan dialog.

DAFTAR PUSTAKA

Cottey, A and Foster, A (2004) Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation. New York: Oxford University Press.

- Jemadu, Aleksius (2008). Politik Global dalam Teori & Praktik. Jakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Mahroza, Joni, Rajendra, Penny. Wibisono, Makarim (2022) "Indonesia's Vision As Global Maritime Fulcrum: A Geopolitical Strategy To Address Geopolitical Shifts In Indo-Pacific. Journal of Positive School Psychology
- Miles, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. (2012). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Pedrason, Rodon (2021) Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol 7 No 1.
- Perwita, Anak Agung Banyu (2017) The Implementation Of Socialist Republic Of Vietnam's Defense Policy In Encountering People's Republic Of China's Strategic Position In The South China Sea Dispute, Jurnal Politica Vol 8 No 1.
- Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Penerbitg Alfabeta.